

Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang

Diana Dewi Sartika, Eva Lidya, Tri Agus Susanto
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sriwijaya,
Indralaya 30662, Indonesia

E-mail : diana_pswunsri@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini ingin melihat bagaimana kegiatan komunikasi politik yang dilakukan oleh para caleg perempuan pada pemilu legislatif 2009 yang lalu dan juga apakah komunikasi politik yang dilakukan mempengaruhi terpilihnya perempuan untuk lolos menjadi anggota legislatif. Secara umum hasil penelitian terkait komunikasi politik yang dilakukan perempuan memiliki aspek-aspek yang sama dengan komunikasi yang dilakukan pada umumnya. Aspek-aspek tersebut adalah sumber pesan dari calon legislatif, pesan yang disampaikan, media/saluran komunikasi politik, konstituen sebagai penerima pesan, serta umpan balik dari kegiatan komunikasi yang dilakukan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lolosnya perempuan menjadi anggota legislatif. Lebih lanjut yang memiliki pengaruh bagi terpilihnya perempuan di legislatif antara lain karena faktor keluarga dan juga investasi sosial kepada konstituen yang memang dibangun sudah sejak lama.

Legislative Candidates For Women Political Communication Elections For Member Of Legislative In Palembang City

Abstract

This study wanted to see how political communication activities undertaken by women candidates in the 2009 legislative elections ago and also whether political communication that do affect the election of women to qualify to be members of the legislature. In general, the results of research conducted related to women's political communication have the same aspects of the

communication is done in general. These aspects are the source of a message from the candidates, the message, the media / channels of political communication, as a constituent of the recipient, as well as feedback from the communication activities undertaken. The results also show that political communication has no significant effect on the passage of women to the legislature. Have further implications for the election of women in the legislature, among others, because of family and social investment to the constituency that was built long ago.

Keywords : political communication, women legislators

1. PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan sebuah konsep yang sangat umum, dapat dijumpai dalam keseharian. Namun jika komunikasi dikaitkan pada salah satu tema tertentu maka hal ini menjadi sangat spesifik. Salah satunya adalah komunikasi politik. Konsep komunikasi politik dimaksudkan sebagai proses transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, (Karl W Deutsch, dalam Rush dan Althoff, 2005). Lebih lanjut, proses sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik sangat tergantung pada komunikasi politik.

Mengingat aspek komunikasi politik menjadi sangat penting, maka penelitian ini juga akan memfokuskan pada aspek komunikasi politiknya. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan memfokuskan pada komunikasi politik calon legislatif (caleg) perempuan yang mendaftarkan diri untuk lolos sebagai anggota legislatif di tingkat DPRD Kota Palembang.

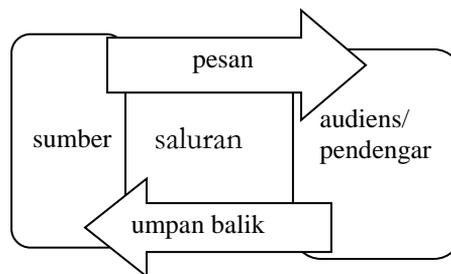
Komunikasi politik caleg perempuan menjadi unik, terlebih di tengah iklim politik yang identik dengan maskulinitas, kejam, saling sikut, penuh dengan intrik, dan lain-lain. Kondisi ini juga diperkuat dengan adanya kebijakan *affirmative action*, yang mau tidak mau mendorong perempuan untuk berkiprah di legislatif. Namun tetap saja, secara kuantitas keterwakilan perempuan masih tetap minim, walaupun tidak dipungkiri ada juga yang lolos untuk menjadi anggota legislatif.

Oleh karena itulah penulis ingin melihat bagaimana proses komunikasi politik caleg perempuan berlangsung. Lebih lanjut, penulis juga ingin melihat kemungkinan, apakah komunikasi politik yang baik memang memberikan kontribusi positif bagi lolosnya perempuan ke parlemen, atau memang karena dipengaruhi juga oleh faktor lainnya.

Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah tersebut, secara umum peneliti ingin melihat bagaimana komunikasi politik caleg perempuan di DPRD Kota Palembang pada pemilu legislatif 2009?. Lebih lanjut penelitian ini juga ingin mengetahui apakah komunikasi politik yang dilakukan mempengaruhi terpilihnya perempuan untuk lolos menjadi anggota legislatif?.

Konsep komunikasi politik dimaksudkan sebagai proses transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, (Karl W Deutsch, dalam Rush dan Althoff, 2005). Komunikasi politik sendiri bukanlah suatu bentuk komunikasi spesifik dan terpisah dari komunikasi secara umum. Oleh karena itu, pola-pola dasarnya pun mengikuti pola-pola komunikasi sosial. Adapun model komunikasi politik secara sederhana hampir sama dengan model komunikasi secara umum, seperti dalam gambar berikut :



Gambar 1. Model komunikasi
(Rush dan Althoff, 2005 : 253).

Unsur suatu sistem komunikasi dalam gambar tersebut terdiri dari : sumber (pesan, atau informasi), pesan, penerima informasi (audiens) dan suatu proses yang dikenal sebagai “umpan balik”. Artinya dalam bentuk yang paling sederhana, proses komunikasi terdiri dari pengirim, pesan, dan penerima. Suatu tindakan komunikasi bermula dari si pengirim. Karena itu, kualitas komunikasi sebagai besar tergantung dari keterampilan si pengirim. Ia harus tahu isi pesan yang ingin disampaikan, siapa penerimanya, dan dengan sarana apa pesan itu harus disampaikan. Kemudian tanggung jawab final dari si pengirim ialah mencari *feedback* atau umpan balik dan mengevaluasinya secara hati-hati, (Maran, 2001).

Jadi, dalam suatu sistem komunikasi politik, sumber yang tipikal mungkin adalah seseorang calon untuk pemilihan bagi suatu jabatan politik; pesannya akan merupakan serangkaian usul politik; salurannya berupa siaran televisi; pendengarnya adalah anggota kelompok pemilih yang kebetulan memperhatikan siaran; dan umpan-baliknya adalah persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap asal-usulnya.

Komunikasi politik memiliki pola-pola, antara lain pola komunikasi vertikal (dari atas ke bawah dan sebaliknya, misalnya dari pemimpin masyarakat kepada rakyat yang dipimpin atau sebaliknya), pola komunikasi horizontal (komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain), pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal), dan pola komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka langsung, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur formal yang berlaku dalam suatu organisasi).

Tanpa adanya komunikasi politik yang efektif, maka aktivitas politik akan kehilangan bentuk. Untuk itu, sumber pesan, misalnya seorang calon presiden, atau seorang calon legislatif dituntut untuk menyampaikan pesan

yang jelas kepada seorang pendukungnya dan masyarakat luas. Di samping itu, calon yang bersangkutanpun harus tahu saluran atau sarana penyampaian informasi yang tepat. Dengan demikian dia pun boleh berharap untuk memperoleh umpan balik yang tepat pula, (Maran, 2001 : 163).

Pada konteks calon legislatif perempuan dalam melakukan komunikasi politik, termasuk kampanye kepada para konstituennya (pemilih), dia tentu menginginkan umpan balik yang tepat. Tentu saja keinginan pada caleg ini adalah agar konstituen tersebut memilih mereka sebagai anggota legislatif, sehingga menghasilkan akumulasi suara yang banyak hingga mereka akhirnya dapat melenggang sebagai anggota legislatif terpilih.

Oleh karena itulah, penelitian ini digagas, untuk kemudian lebih lanjut melihat, bagaimana komunikasi politik yang dibangun oleh para caleg perempuan ini. Jargon (slogan) atau tema politik apa yang mereka usung, sehingga para konstituen tertarik untuk memilih mereka, atau justru sebaliknya, bagi mereka yang tidak terpilih, jargon politik apa yang sebenarnya mereka jual.

Penelitian Terdahulu

Kajian Mukarom (2008) yang berjudul “Perempuan dan Politik. Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif” ternyata tidak secara spesifik menunjukkan bagaimana komunikasi politik perempuan dilakukan. Namun lebih banyak menjelaskan proses-proses lain diluar komunikasi politik, seperti partisipasi politik, dan budaya politik, termasuk faktor penghambat perempuan untuk terjun ke politik. Sementara, kajian yang memfokuskan pada bagaimana para pemilih perempuan dalam

melakukan komunikasi politik pada pemilu dilakukan oleh Juwito dan Syfa (2009).

Di sisi lain, kajian yang melihat proses komunikasi politik para aktor politik (bukan konstituen) adalah seperti yang dilakukan oleh Kasyfurrahman (2009), yang melihat proses komunikasi politik kiai dari aspek psikologi komunikasi. Peneliti melihat komunikasi kiai tidak sepenuhnya terjadi sebagai peristiwa politik, akan tetapi dalam proses komunikasi politik kiai tersebut di dalamnya melibatkan peristiwa psikologis. Dinamika psikologis dalam proses komunikasi politik kiai dapat dilihat pada individu komunikan, baik komunikator maupun komunike. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi politik kiai secara psikologis menghasilkan gambaran psikologis berupa persepsi, sikap, perilaku dan tindakan terhadap objek politik atau sikap dan perilaku politik yang ditunjukkan oleh kiai. Perilaku memilih yang diperagakan oleh warga terhadap objek politik yang dikomunikasikan oleh kiai juga merupakan pengaruh psikologis dalam proses komunikasi politik kiai. Pada aspek komunikator, kiai memiliki sumber daya pengaruh yang secara pribadi dapat menumbuhkan sikap dan perilaku ketundukan warga terhadap pandangan dan anjuran politik yang ditunjukkannya. Pada aspek media dan saluran komunikasi politik, penggunaan media sosialisasi dan komunikasi yang sesuai dengan keinginan warga desa dapat berpengaruh pada sikap dan perilaku politik warga desa. Pada aspek komunike, perubahan sosial politik yang terjadi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku politik warga desa yang pada semula menunjukkan keselarasan dengan kepentingan politik kiai, selanjutnya perubahan sosial politik tersebut memberikan pengaruh pada kekalahan kiai dalam beberapa peristiwa politik yang berlangsung di Desa Babakan Ciwaringin.

Berbicara mengenai komunikasi politik, maka hal ini tidak terlepas dari sumber berita (pemberi pesan) yang nantinya akan berpengaruh terhadap internalisasi nilai, seperti yang telah dilakukan oleh Wiendijarti (2008). Peneliti melihat bervariasinya narasumber berita politik yang ada di televisi, terkadang semakin membuat masyarakat menjadi bingung dan memberikan ketidakpastian kepada masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian memberikan tekanan kepada pihak media untuk menghadirkan narasumber yang memang dianggap memiliki kredibilitas, khususnya dalam bidang politik. Hal ini penting mengingat apa yang disajikan dalam media, akan dijadikan rujukan, hingga nanti menjadi penanaman nilai tersendiri bagi masyarakat yang menonton tayangan di media televisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang positif dan signifikan antara kredibilitas narasumber dengan internalisasi nilai. Para akademisi memiliki pengaruh yang besar dalam bidang politik, lalu kemudian birokrat, dan terakhir adalah para elit politik.

Pada konteks lokal Sumatera Selatan, penelitian mengenai peran politik perempuan di DPRD Provinsi Sumsel pasca penerapan kebijakan *affirmative action* (Diana Dewi Sartika : 2007) memang tidak membahas secara spesifik mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh caleg perempuan. Namun hasil penelitian memperlihatkan bahwa walaupun telah ada kebijakan *affirmative action* (kuota 30 persen perempuan di legislatif), namun tetap saja peran serta partisipasi politik perempuan di parlemen baik secara kuantitas maupun kualitas masih kalah bersaing dengan laki-laki. Kajian ini memang lebih melihat konteks bagaimana kiprah legislator perempuan setelah lolos sebagai anggota legislatif. Hasil kajian serupa mengenai partisipasi politik perempuan di legislatif juga hampir menunjukkan hal yang sama, (Diana : 2009), Sosialisasi Politik (Diana : 2009), dan rekrutmen politik (Diana : 2012).

Kajian lingkup Sumatera Selatan lainnya dilakukan oleh Eva Lidya (2011 : 152), yang salah satu hasil kajiannya mengungkapkan upaya partai politik yang menjadi studi kasus pada penelitian tersebut dalam meningkatkan partisipasi serta rekrutmen perempuan di legislatif. Hasil kajian menunjukkan pada Partai Amanat Nasional (PAN) menerapkan kebijakan dengan cara “scoring +5”, yaitu setelah dilakukan penskoran terhadap para caleg maka skor untuk perempuan akan ditambah 5 point. Penskoran tersebut dihitung oleh sebuah tim dan kewenangan untuk menentukan nama-nama yang akan dicalonkan berada di tingkat pusat. Penskoran bersifat terbuka dalam arti semua anggota punya peluang yang sama untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Di Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) memiliki strategi yang sedikit berbeda yaitu dengan menerapkan kebijakan 5 (lima) berbanding 1 (satu) dimana dalam setiap 5 (lima) laki-laki ada 1 (satu) perempuan. Strategi ini berlaku baik untuk kepengurusan partai maupun untuk pencalonan anggota legislatif. Di PKS tidak dikenal *affirmative action* dan prinsip yang digunakan adalah semua anggota partai punya kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi pengurus partai atau calon anggota legislatif asalkan memenuhi kriteria yang ditentukan. Sistem rekrutmen di PKS agak berbeda karena seseorang tidak diperkenankan mengajukan diri sendiri tetapi harus diajukan oleh para anggota partai. Dukungan ini sangat menentukan seorang kandidat pengurus atau calon anggota legislatif karena merekalah yang akan mengusulkan namanya. Jadi yang mengusulkan seseorang baik sebagai pengurus partai atau pencalonan anggota legislatif adalah anggota lain. Kondisi yang hampir serupa juga terjadi di Partai Demokrat (PD) dimana tidak ada kebijakan khusus untuk perempuan. Hanya saja, partai memberikan perhatian besar pada perempuan dan akan mendukungnya dengan memberikan nomor jadi sebagai anggota legislatif. Hasil kajian

tersebut hanya terbatas pada parpol yang menjadi studi kasus saja. Jadi kurang meng-*update* upaya pada parpol lainnya guna meningkatkan partisipasi dan rekrutmen politik perempuan di legislatif.

Dari beberapa hasil kajian tersebut, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada komunikasi politik caleg perempuan, yang memang tidak secara spesifik dibahas pada beberapa kajian di atas.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif berupa studi deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan karena pendekatan ini dapat mendeskripsikan latar dan individu secara holistik serta mampu menerima kenyataan ganda/variatif (Bogdan & Taylor, 1993, h. 30). Dalam konteks penelitian ini, studi kualitatif memungkinkan untuk dapat mendeskripsikan latar dari individu para caleg perempuan secara menyeruh, termasuk juga rekam jejak kehidupan para caleg sebelum memutuskan menjadi anggota legislatif.

Lokasi Penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana para informan melakukan aktivitas komunikasi politiknya sebagai caleg perempuan yaitu di Kota Palembang. Pemilihan ini lebih didasarkan atas kriteria dimana Kota Palembang merupakan kota terbesar di Provinsi Sumsel. Dengan asumsi bahwa tingkat kompetisi pada daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di tingkat kabupaten/kota lain di provinsi ini. Selain itu, jumlah anggota legislatif di tingkat kota Palembang ini terbilang tinggi, yaitu sebesar 17,4 persen atau sebanyak delapan orang, dari 46 orang anggota legislatif secara keseluruhan, pada pemilu legislatif tahun 2009, sedangkan pencapaian pada tingkat provinsi saja hanya mencapai 15 persen.

Informan dan Teknik Pengumpulan Data. Data dari penelitian ini digali dari *key informan* yaitu caleg perempuan pada pencalonan anggota legislatif di DPRD Kota Palembang. Caleg perempuan yang berhasil diwawancarai berjumlah lima orang. Empat orang diantaranya adalah caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Palembang, dan satu orang caleg perempuan yang tidak terpilih. Sebagai data tambahan, digali pula data dari satu orang caleg laki-laki yang tidak terpilih. Penentuan informan ini dilakukan secara purposive atau disesuaikan dengan tujuan penelitian. Saat berlangsungnya pengambilan data, peneliti sebisa mungkin melakukan *crosscheck* data kepada informan, baik itu terhadap data yang diperoleh dari dokumentasi maupun wawancara. Sementara itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Instrumen ini digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak keluar dari tujuan penelitian. Namun, instrumen ini bersifat fleksibel (tidak kaku), sehingga memungkinkan informan bercerita lebih mendalam mengenai pertanyaan yang diajukan. Observasi dilakukan dengan melihat aktivitas keseharian perempuan anggota legislatif, terutama terhadap teknik komunikasi yang dilakukannya, walaupun memang tidak mendapatkan secara langsung data mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh caleg, lebih-lebih pada saat kampanye berlangsung. Mengingat waktu pelaksanaan kegiatan kampanye tersebut telah lama berlalu, yaitu sebelum pemilu 2009 berlangsung. Di sisi lain, pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis data-data berikut arsip-arsip yang berkenaan dengan masalah penelitian. Data tersebut, antara lain adalah data mengenai jumlah

dan persentase perempuan di legislatif pada tingkat nasional, provinsi Sumsel, serta kabupaten/kota di provinsi ini.

Teknik Analisis Data. Analisis data dalam penelitian ini merujuk pada Miles dan Huberman (1992) melalui tiga tahapan analisis data, yaitu : tahap reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dikategorisasikan ke dalam pola tertentu sehingga dapat disajikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Langkah selanjutnya menghubungkan hasil kategori/klasifikasi yang telah didapat dengan referensi ilmiah atau teori yang berkaitan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan Penelitian

Saat ini jumlah perempuan anggota legislatif di DPRD Kota Palembang berdasarkan hasil pemilu legislatif 2009 berjumlah 8 (delapan) orang, dari 46 orang, atau sebesar 17,4 persen dari jumlah keseluruhan. Dari 8 (delapan) orang tersebut, yang berhasil diwawancarai dan menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap caleg perempuan yang tidak terpilih sebanyak 1 (satu) orang, juga 1 (satu) orang caleg laki-laki yang tidak terpilih, untuk melihat tanggapan caleg laki-laki tersebut terhadap caleg perempuan, baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih. Berikut ini adalah sekilas deskripsi mengenai perempuan anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Palembang yang terpilih, yang menjadi informan penelitian. Deskripsi ini diperlukan, paling tidak untuk memperjelas bagaimana latar belakang kehidupan serta rekam jejak yang dimiliki perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif.

Berdasarkan kendaraan politiknya, informan yang diwawancarai berasal dari partai Gerindra, PDI-P, PKB dan PAN. Adapun latar belakang pendidikan informan sebagian besar merupakan sarjana, dan satu orang yang hanya berpendidikan terakhir setingkat SLTA, tepatnya lulusan STM/SMK. Menariknya dari sisi latar belakang keorganisasian, informan penelitian hanya satu orang yang memang benar-benar aktif di organisasi sejak muda. Informan lainnya tidak banyak berkecimpung di keorganisasian, dan walaupun aktif hanya sebagai anggota biasa saja, atau dalam bahasa salah satu informan ‘sekedar numpang namo bae’ (hanya numpang nama saja). Sementara dari sisi latar belakang politik, dua orang informan berasal dari keluarga yang sangat kental kehidupan politiknya, “keluarga orang politik semua. Mulai dari bapak, kakak laki-laki, dan adik. Baik yang berkecimpung di partai, di DPRD Provinsi, dan juga di pusat. Perempuan di keluarga yang aktif politik, memang baru saya”, kata salah seorang informan. Di sisi lain, dua informan lainnya tidak memiliki keluarga dengan latar belakang politik.

Proses Komunikasi Politik Caleg Perempuan

Dalam bentuk yang paling sederhana, proses komunikasi terdiri dari : pengirim pesan, pesan itu sendiri, dan penerima pesan. Hal lainnya yang juga terkait dengan komunikasi adalah media atau sarana penyampaian pesan, dan juga umpan balik dari pesan yang disampaikan. Konteks komunikasi secara umum ini, sama halnya dengan konteks komunikasi politik. Kelima hal inilah yang akan dibahas dalam proses komunikasi politik caleg perempuan.

Pengirim pesan. Dalam konteks penelitian yang menjadi pengirim pesan adalah para caleg perempuan yang berjuang dalam pemilu legislatif 2009 lalu.

Pesan. Adapun inti atau tujuan akhir dari pesan yang disampaikan merupakan ajakan untuk memilih caleg perempuan tersebut.

Hasil penelitian memperlihatkan, jargon ataupun pesan yang disampaikan oleh para caleg perempuan ini adalah bersifat umum, yaitu isu tentang pemberantasan kemiskinan, janji untuk berjuang bagi peningkatan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat tempat caleg dipilih dan lain-lain. Jarang sekali para calon legislatif ini yang spesifik menyampaikan pesan/isu-isu perempuan. Menurut salah satu informan, kampanye termasuk juga slogan serta atribut khusus yang spesifik perempuan tidak berperan banyak dalam menjaring suara, karena yang lebih dipentingkan adalah aksi nyata dalam membantu dan membela masyarakat. Tema yang diusung salah seorang informan yaitu “membela yang benar, dan bekerja untuk rakyat”.

Penerima pesan. Penerima pesan adalah konstituen, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran di daerah pemilihan caleg perempuan yang berlaga tersebut.

Media komunikasi. Sarana atau media yang digunakan oleh perempuan untuk berkomunikasi, selain melakukan komunikasi secara langsung melalui pertemuan dan kampanye terbuka seperti lewat arisan dan pengajian, juga berupa pembagian stiker, kaos dan jilbab. Adapun, media massa, baik itu elektronik maupun cetak tidak digunakan oleh para caleg perempuan untuk berkampanye, para informan juga beranggapan media ini tidak berperan banyak dalam meloloskan para caleg perempuan ke legislatif. Para caleg berdalih, media massa kurang efektif dalam menjaring konstituen, mengingat konstituen menengah bawah memang tidak bahkan jarang memperhatikan iklan politik khususnya iklan politik caleg di televisi tanpa mengenal langsung siapa sebenarnya caleg tersebut.

Namun demikian, para caleg menganggap media massa berperan banyak dalam memberikan pembelajaran politik bagi mereka, apalagi tidak sedikit dari caleg ini yang memang berangkat dari ibu rumah tangga biasa, bukan dari basis keorganisasian sejak muda.

Salah seorang informan yang lebih banyak memfokuskan diri untuk menjangring suara pada masyarakat kelas menengah bawah, berpendapat bahwa model kampanye yang efektif untuk menjangring suara, khususnya untuk masyarakat kelas menengah bawah adalah melalui kampanye “*door to door*”, sedangkan media massa hanya diperlukan untuk kampanye pada masyarakat kelas menengah ke atas, karena yang membaca koran, dan menonton televisi kebanyakan masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan masyarakat kelas menengah bawah, kebanyakan menghabiskan waktu untuk bekerja di sektor informal, lalu begitu sore, pulang, ke rumah untuk beristirahat dan tidur. Beberapa informan lebih memfokuskan diri pada masyarakat kelas menengah bawah karena kampanye pada masyarakat kelas menengah atas, sedikit mengalami kendala, masyarakat ini memang agak sulit bahkan tidak bisa dipengaruhi, atau dalam bahasa informan “masyarakat ini sudah punya pendirian masing-masing, kalau mau masuk ke mereka, taktik dan strategi harus benar-benar jitu”.

Umpan balik. *Output* yang diharapkan dari proses komunikasi yang dilakukan yaitu audiens dapat menangkap pesan dari sumbernya. Jadi *output* yang diharapkan dari proses komunikasi politik ini yaitu konstituen menerima dan memilih caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2009. Hanya saja, tidak semua proses komunikasi politik yang dilakukan oleh para caleg ini memiliki umpan balik yang hasilnya sesuai dengan harapan para caleg. Terbukti dengan adanya caleg perempuan yang tidak lolos menjadi anggota legislatif.

Komunikasi Politik dan Lolosnya caleg Perempuan menjadi Anggota Legislatif

Komunikasi politik merupakan salah satu unsur dalam meloloskan calon legislatif perempuan ke parlemen. Hanya saja, unsur ini bukanlah unsur utama, mengingat unsur penting lainnya adalah jaringan sosial, dukungan finansial dan keluarga (*nuclear* dan *extended*) serta yang tidak kalah penting, dan yang paling penting adalah investasi sosial yang telah dibangun antara konstituen dan calon legislatif itu sendiri, yang tidak serta merta terjadi dalam waktu yang singkat (*instant*).

Contoh kasus, dimana “investasi sosial” merupakan faktor penting dalam lolosnya seorang caleg ke parlemen terlihat dalam ilustrasi salah seorang informan yang memang memiliki latar belakang pergaulan pada salah satu pasar tradisional di kota Palembang. Informan ini berargumen bahwa latar belakang kehidupan dan pergaulan sehari-harinya di pasar itulah yang memungkinkan dia bisa mengenal seluruh kalangan lapisan masyarakat, informan mengatakan, “di pasar, dari tukang becak, sampe orang besar, saya kenal”. Selain menjadi sarana bersosialisasi dan mengenal seluruh lapisan masyarakat, di pasar ini pulalah informan banyak dimintai bantuan oleh orang-orang di sekelilingnya, yang kemudian menjadi “investasi sosial” bagi informan di kemudian hari, ketika mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Misalnya, pada saat terjadi pengejaran oleh Satpol PP kepada para pedagang pasar, informan kemudian membolehkan para pedagang untuk berdagang di halaman rumahnya. Kemudian, pada kejadian, dimana ada salah seorang tetangga yang tidak mampu meninggal dunia, informan langsung buru-buru membelikan kain kafannya. Termasuk juga jika ada yang melahirkan, informan dengan sigap memberikan bantuan berupa apapun juga, termasuk mengurus tabungan pribadinya sendiri. Kejadian lainnya, seperti konflik rumah tangga, perkelahian antar pedagang pasar, banjir

karena selokan tersumbat, penjambretan, dan lain-lain, semuanya mengadakan dan meminta solusi pada informan. Menurut informan, apa yang telah dilakukan pada masyarakat selama bertahun-tahun inilah yang merupakan modal untuk lolos menjadi anggota legislatif. Jadi tidak hanya modal secara finansial saja.

Deskripsi tersebut memperlihatkan bahwa investasi sosial yang dibangun informan sudah sejak lama itulah yang mendokrak suara caleg perempuan hingga akhirnya lolos ke parlemen. Konstituen tentu saja akan memilih orang yang telah mereka kenal, yang memang telah memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan mereka, khususnya pada masyarakat kelas menengah bawah.

Faktor penentu lain, diluar konteks komunikasi politik adalah pemilihan partai politik sebagai kendaraan politik menuju parlemen. Parpol yang sedang naik daun, dan memiliki masa yang besar hingga mencapai *electoral threshold* menjadi jalan penentu ke parlemen. Faktor kendaraan politik ini menyebabkan para caleg tidak jarang berpindah-pindah dari parpol yang satu ke parpol yang lain, guna melihat peluang pada parpol mana mereka bisa lolos.

Salah seorang informan yang lolos dari partai Gerindra beralasan memilih Gerindra sebagai kendaraan politik pada pemilu legislatif tahun 2009 karena memang pada saat itu partai ini gaungnya sedang tinggi. Hal ini ditandai dengan gencarnya iklan partai ini di media massa, lebih-lebih dengan menampilkan sosok Prabowo sebagai capres. Pada pemilu tahun 1999, informan memilih PDI-P sebagai kendaraan politik, juga dengan alasan pada masa itu PDI-P sedang naik daun, dengan menampilkan sosok Megawati Soekarno Putri sebagai capresnya, yang kemudian juga meloloskan informan melenggang ke parlemen. Pemilihan kendaraan politik yang kurang tepat, hingga menyebabkan informan tidak lolos ke legislatif

juga pernah dialami informan pada pemilu tahun 2004. Pada masa itu, informan memilih PBR sebagai kendaraan politiknya. Menurut informan, PBR pada masa itu hanya merupakan partai 'gurem' sehingga kurang dikenal oleh masyarakat.

Di sisi lain, seperti halnya pada beberapa hasil kajian terdahulu, dukungan keluarga (inti dan luas) merupakan aspek penting dalam meloloskan perempuan ke legislatif. (Diana, 2007, 2009). Dalam konteks penelitian ini, semua informan mengatakan bahwa dukungan keluarga adalah yang pertama dan penting. Misalnya, pada informan yang lolos dari PKB. Informan mengatakan bahwa ikut mencalonkan diri ke legislatif lebih dilatarbelakangi karena orang tua dan keluarga yang memang pengikut NU sejak lama. Bapak informan berasal dari Banten, dan merupakan tokoh yang disegani oleh masyarakat sekitar tempat informan tinggal. Artinya, dalam masyarakat yang masih paternalistik, faktor ketokohan menjadi sangat penting dan dapat menarik massa yang cukup banyak. Secara tegas informan mengatakan, *"Saya terpilih lebih karena orang tua saya. Masyarakat memilih saya karena saya anak dari tokoh agama kenamaan di daerah pemilihan saya"*.

Dengan demikian, proses komunikasi politik yang dilakukan oleh perempuan tidak menjadi penentu utama dalam menentukan terpilih tidaknya caleg perempuan menjadi anggota legislatif.

4. Simpulan

Komunikasi politik merupakan salah satu unsur dalam meloloskan calon legislatif perempuan ke parlemen. Hanya saja, unsur ini bukanlah unsur utama, mengingat unsur penting lainnya adalah jaringan sosial, dukungan finansial dan keluarga (*nuclear* dan *extended*) serta yang tidak kalah penting, dan yang paling penting adalah investasi sosial yang telah dibangun

antara konstituen dan calon legislaltif itu sendiri, yang tidak serta merta terjadi dalam waktu yang singkat (instant).

Daftar Acuan

- Bogdan, Robert dan Taylor J Steven. 2005. *Kualitatif, Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hud, Djuwarti. 2009. Analisis Rekrutmen Caleg Perempuan dalam Memenuhi Kuota Politik Perempuan 30 Persen di Lembaga Legislatif, dalam *Jurnal Pusat Studi Wanita Nabila*, ISSN: 1410-6248, Vol. XIII, Nomor 2, September 2009.
- Juwito dan Syfa Syarifa Alawiah. 2009. Pola Komunikasi Perempuan dalam Pemilu, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2009.
- Kasyfurrahman. Zikri. 2009. *Komunikasi Politik Kiai (Telaah Psikologi Komunikasi Atas Proses Komunikasi Politik Kiai, Studi Kasus di Desa Babakan, Kecamatan Cimaringin Kabupaten Cirebon)*, dalam www.uin.malang.ac.id, diakses tanggal 27 Februari 2012.
- Lidya, Eva. 2011. Pemetaan Isu Gender di Bidang Politik di Provinsi Sumatera Selatan dalam *Pergeseran Paradigma Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Menuju Pengarusutamaan Gender*. Solo : CakraBooks.
- Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Miles, Mathew B dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mukarom, Zaenal. Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif, dalam *MEDIATOR*, Vol. 9, No. 2, Desember 2008. Terakreditasi Dikti SK No 56/DIKTI/Kep/2005
- Rush, Michael & Phillip Althoff. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan : Suatu Tinjauan Bernawasan Gender*. Jakarta : PT Grafindo Persada.

- Sartika, Diana Dewi. 2007. *Peran Politik Perempuan di Parlemen Sumsel (Pasca Penerapan Affirmative Action Pada Pemilu 2004)*. FISIP Pascasarjana UGM : Tesis yang dipublikasikan.
- . 2009. Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen (Studi Pada Perempuan Anggota Legislatif di Kabupaten Muara Enim), dalam *Jurnal Majalah Ilmiah Srivijaya*, Volume XV No. 7, Juli 2009, ISSN 0126-4680.
- . 2009. Sosialisasi Politik Calon Legislatif Perempuan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera di Pemilu Legislatif 2009, dalam jurnal *Majalah Empirika*, Volume XIII (1) 2009, ISSN 1410-8364.
- . 2012. Rekrutmen Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD Provinsi Sumsel, dalam *JIPSWARI (Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Unsri)*, Volume III, No. 1 Tahun 2012, ISSN 2087-8966.
- Soetjipto, Ani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Wiendijarti, Ida. 2008. *Pengaruh Kredibilitas Narasumber Berita Politik Terhadap Internalisasi Nilai Berita Politik Pada Masyarakat*, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 6, No. 1, Januari – April 2008.

